



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **R. RIO SURYA BUDI LAKSANA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI**
3. NHK : **142394**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.015.437.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/128 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 113.344.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 716 m2/117 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.346.208.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/212 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 377.504.000
4. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.264.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/70 m2 di KAB / KOTA KETAPANG, HASIL SENDIRI Rp. 118.117.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 334.500.000**

1. MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, SUZUKI S-CROSS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, SUZUKI BALENO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 48.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 61.105.132**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.459.542.132

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.459.542.132

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.